

CATATAN ATAS PEMANTAUAN PERKARA KORUPSI YANG DIPUTUS OLEH PENGADILAN UMUM SELAMA TAHUN 2008

PENGADILAN UMUM : "KUBURAN" PEMBERANTASAN KORUPSI

-277 terdakwa korupsi dibebaskan dan 10 terdakwa divonis percobaan oleh Pengadilan Umum di tahun 2008 -

A. PENGANTAR

Berhasil tidaknya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada akhirnya juga ditentukan oleh ada tidaknya dukungan institusi pengadilan khususnya Mahkamah Agung (MA). Tidak berlebihan jika mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruki pernah mengatakan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sangat tergantung pada komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didukung pengadilan¹. Artinya jika upaya pemberantasan korupsi tidak mendapatkan dukungan dari pengadilan dan Ketua MA sampai kapanpun usaha pemberantasan korupsi akan berjalan ditempat bahkan bukan mustahil mundur kebelakang.

Namun demikian seperti pada tahun-tahun sebelumnya, institusi pengadilan dalam hal ini Pengadilan Umum di tahun 2008 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi yang saat ini didorong oleh pemerintah. Baik MA maupun Pengadilan Umum dibawahnya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), kenyataannya masih menjadi lembaga yang menguntungkan bagi para pelaku korupsi (pengadilan pro koruptor). Hal ini bisa dilihat dari perkara korupsi yang diperiksa dan diputus pengadilan sepanjang tahun 2008.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch selama tahun 2008 terdapat **194 perkara korupsi dengan 444 orang terdakwa** yang diperiksa dan diputus (divonis) oleh pengadilan diseluruh Indonesia mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri = 159 perkara), banding (Pengadilan Tinggi= 10 perkara), kasasi (MA=25 perkara).² Sedangkan nilai kerugian negara dari perkara yang diperiksa dan diputus pengadilan diperkirakan mencapai **Rp 11,7 triliun**.

Rekap Perkara Korupsi yang diputus di Pengadilan Umum 2008

	Jumlah Terdakwa	Vonis Bebas	Vonis -1 tahun	Vonis 1,1 -2 tahun	Vonis 2,1-5 tahun	Vonis 5,1-10 tahun	Vonis Diatas 10	Vonis Percobaan
Terdakwa	444	277	78	55	18	5	1	10
%	100 %	62,38 %	17,57 %	12,39 %	4,05 %	1,12 %	0,22 %	2,25 %

Dari 444 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus, sebanyak **277 terdakwa (62,38 %) divonis bebas/lepas** oleh pengadilan. Hanya 167 terdakwa (37,61 %) yang akhirnya divonis bersalah. Namun dari 167 terdakwa korupsi yang akhirnya diputuskan bersalah tersebut, dapat dikatakan belum memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Terdakwa yang divonis dibawah 1 tahun penjara adalah sebanyak 78 terdakwa (17,57 %). Diatas 1,1 tahun hingga 2 tahun sebanyak 55 terdakwa (12,39 %) atau divonis 2,1 tahun hingga 5 tahun sebanyak 18 terdakwa (4,05 %) serta divonis 5,1 tahun hingga 10 tahun yaitu sebanyak 5 terdakwa (1,12%). Hingga tahun 2008 berakhir hanya ada 1 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun (0,22 %). Hal yang memprihatinkan di tahun 2008, terdapat 10 terdakwa perkara korupsi yang divonis percobaan (2,25%). Secara rata-rata, vonis penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Umum adalah 5,82 bulan penjara.

¹ Pemberantasan Korupsi Tergantung SBY dan Bagir Manan, Koran Tempo, 21 April 2007.

² Jumlah perkara korupsi yang divonis selama 2008 bisa jadi lebih besar karena pantauan ICW hanya berasal dari media nasional dan daerah serta laporan mitra kerja ICW di beberapa daerah.

Dalam hal vonis bersalah, yang paling ringan adalah 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Serui terhadap mantan ketua DPRD Yapen Waropen Amon Wanggai yang diduga melakukan korupsi Dana APBD kabupaten Yapen Waropen. Sedangkan vonis yang paling berat pada tahun 2008 dijatuhkan kepada Dikky Iskandarinata yang divonis 20 tahun penjara karena perkara Pembobolan Bank BNI lewat pencairan surat kredit fiktif di BNI Cabang Utama Kebayoran Baru.

Berdasarkan aktor atau pelaku korupsi, selama tahun 2008 para mantan atau anggota DPRD yang paling banyak menjadi terdakwa yaitu sebanyak 178 orang. Selanjutnya masuk dalam kelompok tiga besar lainnya adalah pelaku korupsi dari sektor swasta yaitu 83 orang terdakwa, Kepala/Staf Dinas sebanyak 61 orang terdakwa, dan staf/mantan pegawai pemerintah daerah/kabupaten sebanyak 41 orang terdakwa.

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dari sejumlah perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Umum selama tahun 2008. *Pertama*, jumlah vonis bebas/lepas bagi terdakwa paling dominan dan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya (lihat tabel). Jumlah terdakwa yang divonis bebas/lepas pada tahun 2008 – berdasarkan pantauan ICW - yaitu 277 terdakwa kenyataannya menambah jumlah terdakwa dibebaskan atau dilepaskan oleh Pengadilan Umum. Dengan demikian selama empat tahun terakhir (sejak 2005 hingga 2008) sedikitnya ada **659** terdakwa korupsi yang divonis bebas/lepas oleh Pengadilan Umum.

Rekap terdakwa korupsi bebas 2005-2008

Tahun	Perkara	Terdakwa	Bebas	%	Bersalah	%
2005	71	243	54	22,22 %	189	77,77 %
2006	124	361	116	31,4 %	245	68,6 %
2007	166	373	212	56,84 %	161	43,16 %
2008	194	444	277	62,38 %	167	37,61 %

Terhadap masih maraknya putusan bebas/lepas di Pengadilan Umum, dalam catatan dan kajian ICW hal ini dapat terjadi akibat beberapa sebab seperti terdakwa memang tidak terbukti bersalah, dakwaan yang disusun oleh jaksa lemah atau sengaja dilemahkan, hakim mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan bagi terdakwa, atau karena kombinasi antara dakwaan yang lemah dan hakim yang mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan. Tiga sebab terakhir yang paling dominan ditemui dari sejumlah putusan hakim yang menjatuhkan vonis bebas bagi para pelaku. Diluar hal tersebut, dalam perkara korupsi yang melibatkan Mantan Ketua dan Wakil DPRD Pati (Wiwik Budi Santoso dan Mundir Syarif), pelaku dibebaskan oleh hakim karena alasan telah mengembalikan kerugian negara sehingga unsur adanya kerugian negara tidak terpenuhi. Pertimbangan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor, yang secara tegas menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana seseorang.

Meningkatnya vonis bebas dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh MA terhadap para hakim-hakim disemua lingkungan pengadilan. Pada sisi lain keberadaan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal sejauh ini tidak lagi diperhitungkan (dan cenderung diabaikan) oleh hakim-hakim pengadilan akibat dipangkasnya kewenangan KY dalam mengawasi hakim melalui putusan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu.

Kedua, terjadi *trend* terdakwa yang divonis ringan sesuai batas minimal penjatuhan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Korupsi bahkan dibawah 1 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 3 dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 disebutkan bagi pelaku korupsi yang terbukti bersalah maka dijatuhi pidana penjara paling sedikit 1 tahun penjara dan paling banyak 20 tahun penjara. Tercatat dari 167 terdakwa yang divonis bersalah, sebanyak 78 terdakwa atau lebih sepertiganya divonis hanya 1 tahun penjara bahkan kurang dari setahun. Dalam hal ini terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana pada batas minimal yang ditentukan. Jika UU tidak mengatur batas minimal setahun penjara (seperti yang diatur dalam RUU Tipikor versi pemerintah), bukan mustahil dimasa mendatang para hakim banyak menjatuhkan vonis dibawah satu tahun atau hanya beberapa bulan penjara saja.

Ketiga, muncul fenomena hukuman percobaan dalam perkara korupsi. Pada tahun 2008 ditemukan adanya 10 terdakwa perkara korupsi yang divonis dengan hukuman percobaan. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kondisi ini maka dapat dipastikan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan bersalah. Terkesan ada upaya “pensiasatan” hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhannya vonis. UU Tipikor hanya mengatur mengenai batas minimum hukuman yaitu 1 tahun penjara namun tidak mengatur apakah seseorang terdakwa dapat dihukum dengan hukuman percobaan. Meskipun dinilai kontroversial, faktanya MA selaku lembaga tertinggi dilindungi pengadilan justru menguatkan vonis percobaan ini seperti dalam perkara korupsi dana APBD Semarang yang melibatkan mantan Ketua DPRD, Mardijo. Celaknya, putusan ini telah menjadi acuan (*Jurisprudensi*) bagi hakim-hakim yang lain. Setelah Mardijo, setidaknya terdapat 9 terdakwa korupsi yang juga divonis dengan hukuman percobaan.

Keempat, MA menempatkan diri sebagai institusi yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dari 277 terdakwa yang divonis bebas, MA paling banyak membebaskan terdakwa korupsi yaitu 121 terdakwa. Peringkat kedua yaitu PN Kisaran Asahan dengan 9 orang terdakwa yang dibebaskan, selanjutnya PN Pamekasan Madura dan PN Purwokerto masing-masing 8 orang. Terbanyak kelima yaitu PN Samarinda dengan 7 orang terdakwa yang divonis bebas.

Putusan Peninjauan Kembali MA yang membebaskan 33 anggota DPRD Sumatera Barat pada bulan Februari 2008 merupakan antiklimaks bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan MA tidak dapat lagi diharapkan berperan aktif dalam memberantas korupsi. Efek bola salju yang dimunculkan oleh PN Padang ketika menghukum 43 anggota dewan sehingga berdampak pada semua perkara korupsi yang melibatkan anggota dewan dapat diadili, kenyataannya ditutup secara pahit oleh MA. Putusan para Hakim Agung (yang tidak agung) terhadap 43 terdakwa korupsi dari Sumatera Barat tersebut akan menjadi acuan (*jurisprudensi*) yang buruk bagi hakim-hakim ditingkat bawah (pengadilan tingkat banding dan pertama). Suatu keniscayaan, semua perkara korupsi yang melibatkan oknum anggota dewan daerah khususnya yang dijerat dengan pelanggaran PP 110 tentang Keuangan DPRD akan divonis bebas oleh hakim pengadilan.

Daftar 5 besar Pengadilan yang bebaskan terdakwa korupsi

No	Pengadilan	Terdakwa (bebas)
1.	Mahkamah Agung	121
2.	Pengadilan Negeri Kisaran Asahan	9
3.	Pengadilan Negeri Pamekasan	8
4.	Pengadilan Negeri Purwokerto	8
5.	Pengadilan Negeri Samarinda	7

Beberapa uraian diatas pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan awal bahwa baik MA dan Pengadilan Umum kenyataannya belum sepenuhnya berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi. Untuk urusan pemberantasan korupsi, apa yang dilakukan pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) seringkali bertolak belakang. Disaat pemerintah bersemangat dalam memberantas korupsi, apa yang dilakukan oleh pengadilan (umum) justru sebaliknya, bersemangat membebaskan atau memvonis ringan terdakwa korupsi. Pada tahun 2008, Pengadilan Umum bahkan telah menjelma menjadi kuburan bagi pemberantasan korupsi. Fenomena yang muncul di Pengadilan Umum pada tahun 2008 ini, dipastikan akan kembali muncul di tahun 2009 dengan kondisi yang diperkirakan akan lebih parah lagi. *Trend* vonis bebas akan meningkat, begitu pula vonis dibawah setahun penjara dan hukuman percobaan bagi koruptor.

Kondisi di Pengadilan Umum jelas sangat berbanding terbalik dengan penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) khususnya ditingkat pertama. Selama tahun 2008 terdapat 27 perkara dengan 31 terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor. Seluruhnya divonis bersalah dan tidak ada satupun yang vonis bebas atau lepas. Pengadilan Tipikor juga tidak mengenal vonis percobaan maupun divonis dibawah 1 tahun penjara. Rata-rata terdakwa korupsi divonis Pengadilan Tipikor selama 50,90 bulan penjara atau 4,24 tahun penjara.

Vonis paling berat di Pengadilan Tipikor yaitu dalam perkara suap yang dilakukan oleh Artalyta terkait dengan perkara korupsi BLBI Sjamsul Nursalim dengan terdakwa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara. Sedangkan vonis ringan Pengadilan Tipikor diberikan kepada Bupati Minahasa Utara, Vonnie Anneke Panambunan yang divonis 1,5 tahun penjara. Secara umum kinerja yang ditunjukkan oleh hakim Pengadilan Tipikor dan waktu penanganan perkara jauh lebih cepat dan dinilai memenuhi “rasa keadilan masyarakat” dibandingkan dengan hakim-hakim di Pengadilan Umum.

Rekap Perkara Korupsi yang diputus di Pengadilan Tipikor 2008

	Jumlah Terdakwa	Vonis Bebas	Vonis -1 tahun	Vonis 1,1-2 tahun	Vonis 2,1-5 tahun	Vonis 5,1-10 tahun	Vonis Diatas 10	Vonis Percobaan
Terdakwa	31	0	0	5	20	2	2	0
%	100 %	0%	0%	16,13 %	64,51 %	6,45 %	6,45 %	0%

Sayangnya keberadaan Pengadilan Tipikor sekarang ini benar-benar berada diujung tanduk. Hal ini terkait dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 lalu kepada pembuat Undang-Undang (UU) untuk membentuk UU tentang Pengadilan Tipikor dalam jangka 3 (tiga) tahun setelah putusan. Sesuai *deadline* yang diberikan MK, maka UU Pengadilan Tipikor ini harus selesai paling lambat 19 Desember 2009. Artinya usia Pengadilan Tipikor hanya tinggal setahun saja.

Meski pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali menyatakan bahwa RUU Pengadilan Tipikor menjadi prioritas bahkan ditargetkan akan selesai sebelum Pemilu 2009, namun faktanya proses pembahasan belum juga dilakukan. Ironisnya, DPR justru menyalahkan pemerintah sebagai penyebab tidak selesainya RUU Pengadilan Tipikor tersebut. Keterlambatan penyerahan RUU oleh Pemerintah memang satu persoalan, akan tetapi berlarut-larutnya proses pembentukan UU di DPR merupakan faktor paling mendasar yang berpotensi menghilangkan eksistensi Pengadilan Tipikor.

Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor oleh DPR, jelas sangat mengkhawatirkan. *Pertama*, proses pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di DPR tidak akan selesai hingga akhir batas waktu karena masing-masing anggota DPR lebih memprioritaskan persiapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2009. *Kedua*, proses pengesahan RUU dapat saja selesai sebelum waktu berakhir namun substansi UU Pengadilan Tipikor berpotensi melemahkan pengadilan khusus ini dan upaya pemberantasan korupsi dimasa datang.

Sejauh ini ada 3 (tiga) isu krusial dalam RUU yang menentukan hidup matinya Pengadilan Tipikor yaitu tempat kedudukan, komposisi hakim *ad hoc* dan karir, kewenangan pimpinan pengadilan dan MA dalam penentuan jumlah dan komposisi hakim. Apabila ketiga ketentuan tersebut tidak diputuskan secara hati-hati oleh DPR maka hal ini akan mendorong upaya pembusukan terhadap Pengadilan Tipikor (baik dari sisi integritas, kinerja maupun kepercayaan publik kepada Pengadilan Tipikor).

Bukan rahasia umum bahwa banyak anggota DPR tidak menyukai keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Pengadilan Tipikor. Salah satu cara “membuat tidak berfungsi” dua institusi antikorupsi ini adalah dengan cara melemahkannya lewat legislasi RUU Pengadilan Tipikor. Hal ini beralasan mengingat sudah ada delapan anggota DPR yang dijerat dalam perkara korupsi oleh KPK. Sudah dua anggota DPR yaitu Saleh Djasit dan Noor Adenan yang telah divonis bersalah, Hamka Yamdu dan Al Amin Nasution bahkan tinggal menunggu vonis dari hakim Pengadilan Tipikor.

Peristiwa paling rawan pada tahun 2009 adalah apabila RUU Pengadilan Tipikor tidak disahkan oleh DPR hingga berakhirnya jangka waktu yang ditentukan MK. Hal ini akan membawa konsekuensi tidak saja membubarkan Pengadilan Tipikor, namun juga berujung pada semua perkara korupsi (termasuk yang ditangani oleh KPK) nantinya akan diadili oleh Pengadilan Umum. Jika demikian yang terjadi, pada satu sisi kondisi ini yang diharapkan oleh koruptor, calon koruptor dan pendukung koruptor. Sedangkan disisi lain hal tersebut merupakan malapetaka bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. STATISTIK PERKARA DAN TERDAKWA

1 Perkara dan Terdakwa (terpantau)

Jumlah perkara	:	194
Jumlah terdakwa	:	444
Perkiraan Nilai Kerugian Negara	:	Rp 11,7 Triliun

2. Tingkat Pengadilan (terpantau)

Pengadilan Negeri	:	159
Pengadilan Tinggi	:	10
Mahkamah Agung	:	25

3. Hukuman

	Jumlah Terdakwa	Vonis Bebas	Vonis -1 tahun	Vonis 1,1 -2 tahun	Vonis 2,1-5 tahun	Vonis 5,1-10 tahun	Vonis Diatas 10	Vonis Percobaan
Terdakwa	444	277	78	55	18	5	1	10
%	100 %	62,38 %	17,57 %	12,39 %	4,05 %	1,12 %	0,22 %	2,25 %

Ket: Vonis Bebas : 277 terdakwa (92 perkara)

4. Aktor

Aktor	Jumlah Terdakwa
Anggota DPRD	178
Swasta	83
Staf BUMN/BUMD	30
Kepala/Staf Dinas	61
Staf/kepala RS	7
Anggota KPUD	13
Ex Gubernur/Bupati*	15
Kepala Sekolah/ Pejabat Kampus	7
Kepala/Staf Pertanahan	2
Staf /Kepala Pemkab/Pemda	41
Lurah/Camat	4
Bapeda/BPK/BRR	3
Jumlah	444

Jakarta, 4 Januari 2009

Data dihimpun dan disusun oleh :

Emerson Yuntho (Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch)

C. DAFTAR PERKARA KORUPSI YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS PENGADILAN (UMUM) SELAMA TAHUN 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
1.	Anggaran Rumah Tangga DPRD Nganjuk	Rp6,8 miliar.	Wakil Bupati Ngajuk Djaelani Ishaq	Sudarwin	Pengadilan Negeri Nganjuk	1 tahun penjara <u>Tuntutan JPU</u> 2 tahun penjara	3 Januari 2008
2.	Pengadaan lahan perumahan Korpri di Babulu, Penajam Pasir Utara (PPU)	Rp 7,5 miliar	Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar	Iwan Wardhana (ketua), Eduart MP Sihaloho, Imelda Herawati, Supandriyo, Rikatama Budiyantie (disenting)	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 18 bulan penjara	7 Januari 2008
3.	Pengadaan lahan perumahan Korpri di Babulu, Penajam Pasir Utara (PPU)	Rp 1 miliar	Arifin Rauf, rekanan swasta		Pengadilan Negeri Tanah Grogot	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 18 bulan penjara	Januari 2008
4.	Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)-Bahan Bakar Minyak (BBM) Parepare tahun 2005	Rp 250 juta	Julius Upa dan Syahril (pengelola atau satuan kerja Program PKPS-BBM dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Parepare)	Sumartono	Pengadilan Negeri Parepare	Bebas Tuntutan JPU 1 tahun penjara	8 Januari 2008
5.	Pengadaan 2 unit kendaraan dinas patwal di lingkungan Pemkab Serang	Rp 250 juta	Ketua Panitia Pengadaan Barang Ujang Jumala dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Ahmad Khalyubi	Yuferry F Rangka, Toto Ridarto dan Yapi	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	9 Januari 2008
6.	Menerima uang pelicin Rp 20 juta untuk pengurusan sertifikat tanah	-	Kepala BPN Surabaya (nonaktif) Khudlori		Pengadilan Negeri Surabaya	15 bulan penjara	9 Januari 2008
7.	Pembebasan tanah seluas 50 hektare untuk pePasar Induk Agrobisnis (PIA) Jemundo di Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.	Rp 56	Pimpinan proyek Sigit Subekti dan Anik Susdiatun yang juga pegawai di Pemerintah Provinsi Jatim, mantan Camat Taman Teddy Resphady dan seorang sepekulan tanah, Jacoeboes Moesa.		Pengadilan Negeri Sidoarjo	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 3-4 tahun penjara	17 Januari 2008
8.	APBD Jateng 2003	Rp14,8 miliar	Mardijo, mantan Ketua DPRD Jateng	Iskandar Kamil, Djoko Sarwoko, dan M Baharudin Qaundy	Mahkamah Agung	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	21 Januari 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
9.	Dana bantuan hukum dan korupsi uang kas daerah	Rp 1,78 miliar	Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Kabupaten Jember, Drs Ec Djoewito	Mujahri	Pengadilan Negeri Jember	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 3 tahun penjara	21 Januari 2008
10.	Dana retribusi sampah kota Palu	Rp3 miliar	Salman Hadiyanto, Direktur CV Basma Cipta Ilahi	Fathurrahman, Pranoto dan Surung Simanjuntak	Pengadilan Negeri Palu	Lepas <u>Tuntutan JPU</u> 1 tahun 3 bulan	24 Januari 2008
11.	Dana operasional DPRD Kaltim periode 1999-2004	Rp 96 miliar	Kasyful Anwar As'ad, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim	Parman Soeparman, Soedarno dan Imam Haryadi	Mahkamah Agung	1 tahun masa percobaan 2 tahun	28 Januari 2008
12.	Penggunaan fasilitas perusahaan untuk pengembangan usaha di luar prosedur dan belum memiliki perundang-undangan tentang kerjasama operasional (KSO) untuk jasa di luar pelayanan telepon biasa	Rp44,9 miliar	Mantan Kepala Divisi Regional (Divre) VII PT Telkom, Koesprawoto, kemudian mantan Ketua Koperasi Karyawan Siporenu, R Heru Suyanto, dan mantan Deputi Kadivre VII, Eddy Sarwono	Ahmad Sukandar, Syarifuddin Umar, Andi Isna R, Nawawi Pamolongo dan Bahtera Perangiangin	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 6 tahun	28 Januari 2008
13.	membantu penerimaan uang oleh Widjanarko Puspooyo dalam pengadaan beras impor dari Vietnam	Rp 7,5 miliar	Widjokongko Puspooyo, Direktur Investasi PT Arden Bridge Investment Limited	Soeharto	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	4 tahun penjara	1 februari 2008
14.	APBD tahun 2002-2003, yaitu penyimpangan dana di pos perjalanan dinas, asuransi kesehatan dan biaya pemeliharaan kesehatan.	Rp2,1 Miliar.	Misnardi Ketua Partai Golkar Lumajang dan Sukidi Anggota DPRD Lumajang dari fraksi PDI-P		Pengadilan Negeri Lumajang	1,5 tahun	Februari 2008
15.	APBD NTB 2001	Rp 17,5 miliar	H.Abukabar Mucchdi, BSc, H.lalu Koeshardi Anggrat, S.H dan I Gusti Komang Padang	Iskandar Kamil S.H.majelis, M. Bahaudin Qaudry S.H., dan Joko Sarwoko S.H. M.H	Mahkamah Agung	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 5 tahun penjara	Februari 2008
16.	Menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya	Rp 78,3 miliar	Widjanarko Puspooyo, bekas Direktur Utama Perum Bulog	Artha Theresia	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	10 tahun penjara <u>Tuntutan JPU</u> 14 tahun penjara	4 Februari 2008
17.	Anggaran rumah tangga dewan untuk pos anggaran purna bhakti, asuransi, tunjangan kesejahteraan, jaring aspirasi masyarakat (jasma), dan	Rp 141 juta	Ketua DPRD Kab Nganjuk, Cholis Ali Fahmi. Anggota Dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa	Sudarwin	Pengadilan Negeri Nganjuk	1 tahun dan denda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan	6 Februari 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
	kunjung tour						
18.	anggaran rumah tangga dewan untuk pos anggaran purna bhakti, asuransi, tunjangan kesejahteraan, jaring aspirasi masyarakat (jasma), dan kunjung tour	Rp154,3 juta	Wakil Ketua DPRD Kab Nganjuk, Suparman dari Partai Golkar	Sudarwin	Pengadilan Negeri Nganjuk	1 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan	6 Februari 2008
19.	dana bantuan operasional sekolah (BOS) Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp1,1 miliar	Drs Kurnia Sakerebau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bendahara, Adolf Bastian Sabola		Pengadilan Negeri Padang	2 tahun penjara	12 Februari 2008
20.	Pemotongan dana penyuluh Agama di Depag Bojonegoro	-	mantan Kakandepag Bojonegoro, Jatim, A. Rozig, K'TU, A. Munir dan Kasi Penamas, Maksum		Pengadilan Tinggi Jatim	Bebas	13 Pebruari 2008
21.	APBD Kudus	Rp 18,5 miliar	Edy Yusuf dan A Zaini, mantan anggota DPRD	Iskandar Kamil	Mahkamah Agung	Bebas	14 Februari 2008
22.	Dana APBD Sumbar tahun 2002	Rp 5,9 miliar	Ketua DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004 Arwan Kasri, Wakil Ketua DPRD Masfar Rasyid dan Titi Nazif Lubuk	Susanti Adinugroho, Mieke Komar dan Abdurrahman	Mahkamah Agung	Bebas	25 Februari 2008
23.	Dana APBD Sumbar tahun 2002	Rp 5,9 miliar	10 Anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004 (Akmal Zein CS)		Mahkamah Agung	Bebas	Februari 2008
24.	Dana APBD Sumbar tahun 2002	Rp 5,9 miliar	10 Anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004 (Abdul Manaf Thaher CS)		Mahkamah Agung	Bebas	Februari 2008
25.	Dana APBD Sumbar tahun 2002	Rp 5,9 miliar	10 Anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004 (Arius Sampeno CS)		Mahkamah Agung	Bebas	Februari 2008
26.	Pengadaan 2 unit kendaraan dinas patwal di lingkungan Pemkab Serang	Rp 250 juta	Direktur CV Tugu Gunung Abadi Saeful Bahri	Syamsi didampingi Tetty SR dan Rama J Purba	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	27 Februari 2008
27.	APBD Donggala tahun 2006	Rp 84 miliar	Awaluddin Husen Arep, Anggota DPRD Kabupaten Donggala	AA Aripathi	Pengadilan Negeri Donggala	6 tahun penjara	28 Februari 2008
28.	Proyek pembebasan tanah untuk lokasi terminal di Larantuka, ibu kota Kabupaten Flotim	Rp 209 juta	Bupati Flores Timur (Flotim) periode 2000-2005, Felix Fernandez	Frans Arkadius Ruwe, Ida Bagus B Patiputra dan I Wayan Suarta,	Pengadilan Negeri Larantuka	1 tahun penjara	3 Maret 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
29.	PT Telkom	Rp36,2 miliar	Gregory Budianto, direktur PT Komunindo Data Network (KDN) dan Siauw Wie Sin, komisaris PT KDN	Istining Kadariswati SH,	Pengadilan Negeri Denpasar	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 6 tahun penjara	3 Maret 2008
30.	PT Telkom	Rp36,2 miliar	Mantan Kakandatel Denpasar Ir Wayan Haryantha (51) dan mantan Ketua Koperasi Karyawan Telkom Siporennu (KTS), Syamsul B Pahar (44).	-	Pengadilan Negeri Denpasar	1,5 tahun penjara (Wayan Haryantha) 1 tahun penjara (Syamsul P Pahar)	3 Maret 2008
31.	Dana APBD Luwu Utara 2003-2204	Rp 700 juta	mantan Ketua DPRD Luwu Utara (Lutra) periode 1999-2004 yang kini menjabat Ketua DPRD Luwu Timur (Lutim), A Hasan Opu Tohatta, mantan Wakil Ketua DPRD Lutra 1999-2004, A Rahmawati dan KH Yabani		Pengadilan Negeri Palopo	Bebas	13 Maret 2008
32.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep	Rp 40 miliar	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, Ahmad Masuni, Komisaris BPRS Moh Toha dan Direktur BPRS Abdul Sukkur	Harsono	Pengadilan Negeri Sumenep	Bebas	13 Maret 2008
33.	Pembangunan Pabrik Gula Mini (PGM) Kigumas, Malang	Rp 1 Miliar	Syamsul Bahri, Anggota nonaktif Komisi Pemilihan Umum		Pengadilan Negeri Malang	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 2 tahun penjara	13 Maret 2008
34.	Dana belanja modal gedung yang bersumber dari DIPA Provinsi Aceh tahun anggaran 2006	Rp110 Juta	Kepala Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Provinsi Aceh Nurkhatiah binti Abubakar	Sugeng Budianto, SH, Syukri,SH, M.Hum dan Rahmawati,SH	Pengadilan Negeri Banda Aceh	1 tahun penjara	18 Maret 2008
35.	Pengembangan usaha dibidang pengolahan kelapa sawit (CPO)	Rp9,3 miliar	mantan Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Riau, Ir Syarief Abdullah	Widada	Pengadilan Negeri Pekanbaru	6 tahun penjara	25 Maret 2008
36.	Dana Askeskin	Rp 2,4 milyar	IGA Mayani Budi, mantan staf entry data RS Sanglah		Pengadilan Negeri Denpasar	4 tahun penjara	27 Maret 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
37.	Proyek penimbunan PPI Cempae Parepare	Rp319 juta	Abdul Wahid, Abid Dachil, (Subdin Pengairan maupun Subdin Bina Marga DPU) dan Wahid Husein.	Agung Sutumo	Pengadilan Negeri Parepare	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> Abd Wahid dan Abid Dachil (4 tahun) Wahid Husein (5 tahun)	27 Maret 2008
38.	Pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kalimantan Timur	Rp 907 juta	Hasim bin Uteh Direktur CV Handi Guna , Yunizar Ismet, Direktur CV Ryan Perdana dan Try Tyas Wardono, Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur	Dedi Fardiman SH	Pengadilan Negeri Samarinda	Bebas Tuntutan JPU Hasim bin Uteh (5 Tahun penjara) Yunizar Ismet, dan Try Tyas Wardono (1,5 tahun penjara).	27 Maret 2008
39.	Penyalahgunaan dana fresh money tahun 2005	20 juta	Kepala Desa Cirendeu, Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang, Oman Subadri	Maenong, Lili Mokoginta dan Toto Ridarto	Pengadilan Negeri Serang	1 tahun penjara	31 Maret 2008
40.	Penyelewengan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertambangan tahun anggaran 2004- 2005	Rp114 juta	Rosman , Bendahara Dinas Pertambangan Maros	Amril SH M Hum, dan Ni Putu Sri Indayani SH serta Eni Indriartini SH	Pengadilan Negeri (PN) Maros	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> satu tahun tiga bulan penjara	31 Maret 2008
41.	Proyek pengadaan buku di Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim	Rp 900 juta	Tri Tyas Wardono (mantan kepala Disdik Kaltim), Syahrani Ismail (kuasa pengguna anggaran), Hasyim Uteh (Dirut CV Handi Guna), dan Yunizar Ismet Faizal (Dirut CV Ryan Perdana).		Pengadilan Negeri Samarinda	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> Tri Tyas 5 Tahun penjara Hasyim dan Yunizar 1,5 tahun penjara	April 2008
42.	Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan gelanggang olahraga (GOR) Ki Mageti Magetan	Rp 6,7 miliar	Bupati Magetan (non aktif) Saleh Muljono		Pengadilan Tinggi Jawa Timur	4 tahun penjara	April 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
43.	Proyek pengadaan mesin penggerak dan pompa turbin di Dinas PU Pengairan Kabupaten Sumenep	Rp. 2,5 milyar	Ir. H. R. Edy Mustika mantan Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sumenep, Mulyadi dan Muhtar Hadi, keduanya rekanan proyek		Pengadilan Negeri Sumenep	1 tahun penjara	1 April 2008
44.	Proyek pembangunan pasar Sudu Kab Enrekang	Rp520 juta	Dulman, pimpinan proyek		Mahkamah Agung	Bebas Tuntutan JPU	4 April 2008
45.	Dana pinjaman anggota DPRD Kota pada APBD tahun 2004	Rp 1,8 miliar	Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Tanjungpinang H A Gafar Walid dan mantan bendahara Pemko, Adi Purwanto		Pengadilan Tinggi Riau	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> Gafar Walid (5 tahun) Adi Purwanto (4 tahun)	4 April 2008
46.	dana proyek pembangunan PLTD Unit 22 Sungaibahar, Muarojambi	Rp 4 miliar	Mantan Bupati Muarojambi As'ad Syam	Perdana Ginting.	Pengadilan Negeri Sengeti Jambi	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun penjara	6 April 2008
47.	dana proyek pembangunan PLTD Unit 22 Sungaibahar, Muarojambi	Rp 4 miliar	Sudiro Lesmana, Direktur PT Cipta Pesona Usaha	Perdana Ginting.	Pengadilan Negeri Sengeti Jambi	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 6 tahun penjara	6 April 2008
48.	proyek pembangunan dan pengembangan usaha tani	Rp200 juta	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Mahmud Tan		Pengadilan Negeri Ambon	1 tahun penjara	7 April 2008
49.	Pengadaan 2 unit kendaraan dinas patwal di lingkungan Pemkab Serang	Rp 250 juta	Nana (Ketua Panitia Pemeriksa Barang) dan Mastupah (Bendahara Panitia Pemeriksa Barang)	Sabarudin Ilyas, Yohanes Priyana	Pengadilan Negeri Serang	Bebas Tuntutan JPU	14 April 2008
50.	Proyek reklamasi Pantai Bawean	Rp 1,2 miliar	Zaenal Arifin, kontraktor CV Daun Jaya Arifin	Eddy Kirbyantoro, Muhammad Hasyim dan Joedi Prajitno	Pengadilan Negeri Gresik	Putusan Sela Bebas Tuntutan JPU	15 April 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
51.	proyek pengadaan 600 ekor sapi tahun 2004 dan 2005 serta 10 ekor kuda dan 10 ekor kambing tahun 2005 di Disnak Sumba Timur	Rp 341 juta	Ir. Siliwolu, M.Si dan John Untono	Gusti Ngurah Astawa, S.H, , MD GD Trinajaya Susila, S.H dan B U Resa Syukur	Pengadilan Negeri Waingapu	Bebas	15 April 2008
52.	Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)	Rp 410 miliar	Direktur Utama PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Mayjen (Purn) Subarda Midjaja	Sarpin Risaldi	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	5 tahun penjara <u>Tuntutan JPU</u> 7 tahun	16 April 2008
53.	Penyalahgunaan dana di KPUD Bantul	Rp371 juta	Pintoko, Bendahara KPUD Bantul	Purnomo	Pengadilan Negeri Bantul	1 tahun penjara	18 April 2008
54.	Penyalahgunaan dana di KPUD Bantul	Rp371 juta	Ketua KPUD Bantul Arif Iskandar, Ketua Divisi Logistik KPUD Bantul Suwandi Danu Subroto, Sekretaris KPUD Bantul Marsono		Pengadilan Negeri Bantul	1 tahun penjara	18 April 2008
55.	Dana bantuan politik (Banpol)	Rp 1,06 miliar	Suyitno Miskal, mantan Kepala Bakesbang Linmas Kota Surabaya	Berlin Damanik	Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas Tuntutan JPU 1,5 tahun penjara	21 April 2008
56.	Perjalanan dinas fiktif dan mark-up anggaran perjalanan dinas	Rp549 Juta	Obed Nego Depparinding yang juga mantan ketua DPRD MAMASA, serta Amos Pabundu, dan Urias Daud, masing-masing wakil ketua	Yunus Sesa, SH, MH Zulkarnaen, SH dan Novianto Hermawan, SH	Pengadilan Negeri Polewali	Bebas Tuntutan JPU	23 April 2008
57.	Dana purna bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo periode 1999-2004	Rp 3,5 miliar	Mantan Wakil Ketua DPRD Drs Istiharto (65) dan Sumarno		Pengadilan Negeri Purworejo	15 bulan penjara	25 April 2008
58.	Dana purna bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo periode 1999-2004	Rp 3,5 miliar	mantan Wakil Ketua DPRD Aedy Korim		Pengadilan Negeri Purworejo	1 tahun penjara penjara	25 April 2008
59.	Penjualan aset di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat	Rp 69 juta	Ir Darizal dan Drg Helmy Rustam, MM		Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1 tahun masa percobaan 2 tahun	28 April 2008
60.	Penjualan aset tanah seluas 8.233 meter milik PT Iglas	Rp 22 miliar	mantan Direktur tama PT Iglas, Daniel S Kuswandi	Yakup Ginting	Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas Tuntutan JPU 8 tahun penjara	30 April 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
61.	Pembangunan jalan di Sanggi, Tanggamus-Bengkunat, Lampung Barat, sepanjang 7,5 km	Rp 6,070 miliar	Zulkarnaen, kontraktor	Andreas	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	4 tahun penjara	30 April 2008
62.	Pembangunan jalan di Sanggi, Tanggamus-Bengkunat, Lampung Barat, sepanjang 7,5 km	Rp 6,070 miliar	Wawan Susanto, kontraktor	KG Damanik	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	1 tahun penjara	30 April 2008
63.	Dana Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin).	Rp 12,4 juta	Sanusi, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Sumberejo, Kecamatan Besuki	Tamsyir	Pengadilan Negeri Situbondo	1 tahun penjara	30 April 2008
64.	dana tak tersangka APBD Kampar tahun 2004	Rp14 miliar	Sekdakab Kampar, Zulher	Abbas Said	Mahkamah Agung	Bebas Tuntutan JPU 10 tahun penjara	Mei 2008
65.	penyalahgunaan dana PT Asuransi ABRI (Asabri)	Rp410 miliar	Henry Leo, rekanan Departemen Pertahanan	Sarpin Risaldi	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	6 tahun penjara dan uang pengganti Rp70,9 miliar	6 Mei 2008
66.	pengadaan logistik Pilkada Banten 2006	Rp 984 juta	Didi Hidayat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten dan Gaos Misbach, ketua panitia pengadaan logistik Pilkada Banten 2006	Syamsi, R Sabarudin Ilyas dan Teti SR	Pengadilan Negeri (PN) Serang,	1 tahun penjara	6 Mei 2008
67.	Proyek normalisasi Kali Brungut di Kecamatan Warureja Slawi	Rp 796 juta	Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Ir Sarsito	HL Tobing SH	Pengadilan Negeri Slawi	Bebas Tuntutan JPU 1 tahun penjara	7 Mei 2008
68.	dana bantuan operasional sekolah (BOS)	Rp 107 juta	Kepala Sekolah SD Maria Fransisca, Bekasi, Leviana	Edy Hasni SH	Pengadilan Negeri Bekasi	1 tahun penjara	7 Mei 2008
69.	proyek taman bermain "water boom"	Rp 6,5 miliar	mantan Kepala Kantor Kas Daerah Propinsi Jambi, A Rahman		Mahkamah Agung	9 bulan penjara	9 Mei 2008
70.	membuka lahan kebun sawit tanpa izin pemanfaatan lahan dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan NAD	-	Bupati Simeulue Darmili dan Direktur Perusahaan Daerah Simeulue Ir Yazid	Mas Hushendar, Syukri dan Jamaluddin	Pengadilan Negeri Banda Aceh	1 tahun penjara	12 Mei 2008
71.	membantu penerimaan uang oleh Widjanarko Puspooyo dalam pengadaan beras impor dari Vietnam	Rp 7,5 miliar	Widjokongko Puspooyo, Direktur Investasi PT Arden Bridge Investment Limited		Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	2 tahun penjara	14 Mei 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
72.	pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang Kabupaten Bandung	Rp220 juta	Meriana Sitorus dan Ruhiat (pegawai RSUD)	Bagus Irawan	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Bebas Tuntutan JPU 3 tahun penjara	15 Mei 2008
73.	dana pengurusan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 2003-2007	Rp 6 miliar	Djumbadi	Suhartoyo, Arozi Waruwu, dan S. Silalahi	Pengadilan Negeri Bekasi	2 tahun 8 bulan penjara	15 Mei 2008
74.	perintisan Balai Latihan Kerja Klaten	Rp49 juta	Bambang Purwanto, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)		Mahkamah Agung	Bebas	23 Mei 2008
75.	penggunaan dana pos tak tersangka APBD Rokan Hulu 2003	Rp3,053 miliar	H Ramlan Zas SH MH dan Drs H Syarifuddin Nst MM selaku mantan Bupati dan mantan Sekda Kabupaten Rohul 2001-2006		Mahkamah Agung	1,3 tahun penjara	Mei 2008
76.	Pengadaan Buku Ajar SD/MA di Kab. Semarang tahun 2004	Rp321 juta	Bupati Semarang nonaktif Bambang Guritno	Hari Mulyanto	Pengadilan Negeri Ungaran	2 tahun penjara	22 Mei 2008
77.	proyek survei angkatan kerja daerah (Sakerda) tahun 2006	Rp73,584 juta	Kepala Disnaker Karawang Thobi'in Mashudi		Pengadilan Negeri Karawang	Bebas Tuntutan JPU 2 tahun 6 bulan penjara	27 Mei 2008
78.	proyek survei angkatan kerja daerah (Sakerda) tahun 2006	Rp73,584 juta	Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Karawang, Prastowo dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, Hamdani Siswoyo	Thursinah Aptianti, Muhamad Siradj dan Yusticia Roza Puteri	Pengadilan Negeri Karawang	1 tahun penjara	27 Mei 2008
79.	Gratifikasi (menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya)	Rp 78,3 miliar	mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspooyo	Yanto Kartono Moelyo	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	10 tahun penjara	28 Mei 2008
80.	dana APBD 2003	Rp 1,45 miliar	12 anggota DPRD Kerinci 1999-2004 (Sawir Samad, Firmansyah, Yusuf Sagoro, Rusli Daud, Baharudin, Khadijah, Mansurdin Sani, dan Aminudin, Zainal Arifin, Mat Sadri, Ferry Siswadi, Mat Rahmawi)		Mahkamah Agung	1,5 tahun penjara	29 Mei 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
81.	dana sumber daya manusia (SDM) APBD Sidoarjo	Rp 21,3 miliar	sembilan terdakwa anggota DPRD 1999-2004. Yakni, Abd Shomad, Ato'i Towali, Choiri Nur Afandi, Guntur Eko, Ahmad Ali Fauzan, Tito Pradopo, Sumi Harsono, Purwadi Sigarlagi, dan (alm) Sardjito.		Mahkamah Agung	1,5 tahun penjara	29 Mei 2008
82.	Dana APBD kabupaten Yapen Waropen	Rp 90 juta	Markus Karubaba, Mantan Sekda Kabupaten Yapen Waropen	Wayan Karya. SH. MHum didampingi oleh Ben Ronald.P. Situmorang. SH dan Ahmad Rizal Nasution	Pengadilan Negeri Serui	Bebas	6 Juni 2008
83.	Dana APBD kabupaten Yapen Waropen	Rp 90 juta	ketua DPRD Amon Wanggai, S.Sos. Jhon Mansay. S.Sos dan Nehemia Payawa.S.Sos	Wayan Karya	Pengadilan Negeri Serui	Amon (6 bulan penjara) Nehemia (1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun)	6 Juni 2008
84.	pelaksanaan proyek di Perum Bulog Riau	Rp10 miliar	Syarif Abdullah (Kepala Divisi Regional Bulog Riau), dan Syafii Matondang (Kepala Bidang Komersial Bulog)	Damdani, Sofyan dan Gatot,	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Bebas Tuntutan JPU 7 tahun penjara	9 Juni 2008
85.	pelaksanaan proyek di Perum Bulog Riau	Rp10 miliar	Hendri Meirizal (Kepala Bidang Perdagangan) dan Zulbukhari (Bendahara PT Rezki Cipta Ilahi)	Sofyan, Marten dan Gatot	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Bebas	10 Juni 2008
86.	anggaran sosialisasi peningkatan disiplin lalu lintas dan honor tenaga kontrak	Rp 697, 5 juta	Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Aslan Harahap	Kartim	Pengadilan Negeri Medan	1, 6 tahun penjara	16 Juni 2008
87.	APBD 2003 Kota Semarang di pos asuransi jiwa	Rp1,728 miliar	Fathurrahman, Santoso Hutomo, Agustina Wilujeng, Shonhadji Zaenuri, Tohir Sandirdjo, dan Hindarto Handoyo. (mantan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang periode 1999–2004)		Pengadilan Negeri Semarang	1 tahun penjara	17 Juni 2008
88.	proyek penyulingan air (Disalinasi) di Desa Banbaru, Kecamatan Gili Genting, Sumenep, Madura	Rp108 juta	Kepala Kantor ESDM Sumenep, Moh Fadilah	Suprpto (disenting), Kurniasari dan Erni Priatiawati	Pengadilan Negeri Sumenep	Bebas	19 Juni 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
89.	APBD Lombok Tengah tahun 2003		mantan pimpinan DPRD Loteng, yakni Drs. H.L. Ahmad Ramli, Drs. H. Saigun dan Mariadi,	Winarto	Pengadilan Negeri Praya NTB	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun penjara	26 Juni 2008
90.	Penyalahgunakan dana Kredit Usaha Tani (KUT) Lewaya Takalar	Rp 84 juta	Anggota DPRD Takalar dari Partai Merdeka, Abd Rahman Nassa	Richard Silalahi	Pengadilan Negeri Takalar	1 tahun empat bulan penjara	26 Juni 2008
91.	anggaran APBD Kabupaten Purworejo 2004	Rp 2,3 miliar	Mantan Bupati Purworejo Marsaid	Priyo Utomo	Pengadilan Negeri Purwoerjo	1 tahun penjara	26 Juni 2008
92.	anggaran APBD Kabupaten Purworejo 2004	Rp 2,3 miliar	Suyadi, kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo		Pengadilan Negeri Purwoerjo	1 tahun penjara	Juni 2008
93.	anggaran APBD Kabupaten Purworejo 2004	Rp 2,3 miliar	Ketua Yayasan Komunitas Jogjakarta Didit Abdul Madjid dan Direktur PT Grasindo Rejo Mandiri Fatkhulloh		Pengadilan Negeri Purwoerjo	1 tahun penjara	Juni 2008
94.	dana Pemilu 2003-2004	Rp 1 miliar	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepulauan Seribu Tobaris Tani, Kusuma yang menjabat sebagai Sekertaris KPUD Kepulauan Seribu serta Agus Slamet (Bendahara).	Nelson Samosir	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1 tahun penjara	13 Mei 2008
95.	Proyek di Bappeda Lampung	Rp 196 juta	Kepala Bappeda Bandar Lampung Tjandra Tjahya dan Pemimpin Proyek Faisol Muchtar	Machmud Rachimi	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	1 tahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan	26 Juni 2008
96.	pengadaan buku ajar Kabupaten Sleman periode 2004	Rp12 miliar	Muhamad Bachrum, Kepala Dinas Pendidikan Sleman	Herry Swantoro	Pengadilan Negeri Sleman	5 tahun penjara denda Rp500 juta	4 Juli 2008
97.	pengadaan buku ajar Kabupaten Sleman periode 2004	Rp12 miliar	Muhdori Masuko, Ketua Tim Pengadaan Buku Ajar Kabupaten Sleman	Sumanto	Pengadilan Negeri Sleman	4,6 tahun penjara denda Rp 200 juta	4 Juli 2008
98.	PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon	Rp 2,01 miliar	Nono Sudiono Dirut PD Bank Pasar, Yokie Marhana Kabag Kredit PD Bank Pasar, Erli Fasini mantan Dirut PD Pembangunan Kota Cirebon, dan Basuki Dwi Purnomo koordinator nasabah	Sutadi SH,	Pengadilan Negeri Cirebon	5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan	26 Agustus 2008
99.	Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi korban banjir	Rp5,8 miliar	Darlis Ilyas, Mantan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau	Dahlia Brahmana, Asnawati dan Marlianis	Pengadilan Negeri Pekanbaru	4 tahun penjara	13 Agustus 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
100.	Dana DPRD Asahan tahun 2001-2003	Rp10 miliar	9 anggota DPRD Asahan tahun 1999-2004 (Syahril Sitorus, Zaid Afif, SH, Suhaimi Tanjung, Drs.Bustami HS, Effendi Tanjung, Nasir Tarigan, Ramli Hasibuan, H.Ahmad Sahri, dan H.Safii Junaidi)	Shopia M.Tambunan, SH, Tira Tirtona SH, Inna Herlina SH, Wildan Al Hilal, SH, dan Afrizal, SH	Pengadilan Negeri Kisaran	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun penjara	30 Oktober 2008
101.	Korupsi PT Perkebunan Nusantara II seluas 78,16 hektare		mantan Direktur PTPN II Suwandi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Faisal serta seorang pengembang, Supriyanto		Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	Bebas	5 April 2008
102.	Proyek swakelola	Rp 17,1 miliar	Faisal		Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	Bebas	Maret 2008
103.	proyek pengadaan alat-alat olahraga diknas kota dari dana APBN 2004	Rp 134,7 juta	A. Taufik dan Syamsuri, staf diknas kota Pangkalpinang	Lilin Herlina SH, Isnurul SA SH MHum, T. Sirait SH	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 1,6 tahun penjara	22 Oktober 2008
104.	Proyek rumah dinas DPRD Bangka Selatan	Rp 607 juta	Alwi Taufik Direktur PT Alta Jaya, Emran Munzir pimpinan CV Diesel Power Utama, dan Adib Fauzi pimpinan CV Panca Setai Baru.		Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Bebas	Oktober 2008
105.	Proyek pengadaan tanah		Subrata, Plt Kades Rajik Simpang Rimba		Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Bebas	Oktober 2008
106.	Perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton, Jakarta	Rp 1,936 triliun	Ali Mazi (mantan Gubernur Sultra) dan Pontjo Sutowo (pengusaha)	Bagir Manan, Paulus Efendi Lotulung, Harifin Tumpa dan Iskandar Kamil	Mahkamah Agung	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 7 tahun penjara	Oktober 2008
107.	APBD Banyumas untuk pos DPRD	Rp1,098 miliar	8 mantan anggota DPRD Banyumas (R Suprpto, Heryanto Sarkum, Darsono Rowi, Wasitah Yusuf, Anfatoni, Achmad Daldiri, Kisworo dan M Bakir)		Pengadilan Negeri Purwokerto	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 2 tahun penjara	12 Agustus 2008
108.	APBD Banyumas untuk pos DPRD	Rp1,098 miliar	12 mantan anggota DPRD banyumas		Pengadilan Negeri Purwokerto	1 tahun	12 Agustus 2008
109.	Proyek jalan Dawan-Masiwang, di Kabupaten Seram Bagian Timur	Rp 620 juta	Kepala Dinas PU SBT Nurdin Monni, Pimpinan Proyek Rivai Waleuru dan kontraktor pelaksana Sugeng Siswanto alias Tanjung	Muhammad	Pengadilan Negeri Masohi Maluku	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 1 tahun 6 bulan penjara	September 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
110.	Pengadaan kapal Pamahanunusa di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun 2006	Rp 1,9 miliar	Karel Marthen Rumpuy, pemilik PT Yang Marine		Pengadilan Negeri Masohi Maluku	Bebas	September 2008
111.	Dana operasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banjarmasin	Rp 97,250 juta	Sriyanto, mantan Bendahara BPK RI Perwakilan Banjarmasin di Banjarbaru	Ita Widya Ningsih	Pengadilan Negeri Banjarbaru	2 tahun penjara	15 Agustus 2008
112.	APBD 2001–2003	Rp10,5 miliar	9 anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Asahan 1999–2004	Syofia Maria Tambunan	Pengadilan Negeri Kisaran	Bebas	30 Agustus 2008
113.	Proyek Tapal Batas Dinas PU Kukar		Sugianto, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar)	Sunaryo Wiryo	Pengadilan Negeri Tenggarong	Bebas	3 November 2008
114.	Pembelian CLM (Citra Logam Mulia)	Rp 1,9 miliar	Dwiatmo Hadianto, mantan Bupati Pamekasan		Pengadilan Negeri Pamekasan	Bebas	30 Oktober 2008
115.	Pengadaan 370 ton gabah		Sapto Tulus Santoso, juru gudang Bulog Sub Divre III Bojonegoro		Pengadilan Negeri Bojonegoro	Bebas	September 2008
116.	penyalahgunaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang kesehatan tahun 2004	Rp 673,1 juta	Siti Nuraini Arief, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Solo	Hamim Y Sugi Widharta	Pengadilan Negeri Solo	1 tahun penjara dan denda Rp50 juta	10 November 2008
117.	APBD Mamuju Utara	Rp 40,95 miliar	Ketua Partai Golkar Mamuju Utara (Matra) yang juga Ketua DPRD Matra Yaumil RM		Pengadilan Negeri Mamuju	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun	10 Oktober 2008
118.	Pembuatan surat perjalanan dinas fiktif dan mark up anggaran	Rp 549 juta	Ketua Golkar Mamasa Obed Nego Depparinding		Pengadilan Negeri Mamuju	Bebas	1 Mei 2008
119.	Pengadaan 367 unit sepeda motor Honda Supra Fit	Rp 3,784 miliar	Imam Syafi'i, Asisten III Bidang Administrasi Pemerintahan, dan Purwanto Adi Prabowo, Kepala Kantor Arsip Pemerintah Kabupaten Kediri,	Erry Mustianto	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 1,5 tahun	21 Agustus 2008
120.	Pembangunan tapal batas Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota	Rp 1,1 miliar	Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rahmat Santoso	Sunaryo Wiryo	Pengadilan Negeri Tenggarong	2 tahun penjara	28 Oktober 2008
121.	Penyalaahgunaan dana APBD Bali	Rp 28,6 miliar.	35 anggota DPRD Bali periode 1999-2004		Mahkamah Agung	Bebas	September 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
122.	Penyalahgunaan di PLN		Ir. Mohammad Noer Hidayat bin Kaswan, Ketua Tim Evaluasi Proyek Audit PT PLN, Ir. Darwin Abbas, kepala manajemen proyek, Manansjah Sumarkho alias Bobby dan Sumarkho, direktur operasi dan Dirut PT Tawada Graha.		Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 5 tahun penjara	13 Oktober 2008
123.	Proyek pengadaan buku perpustakaan FKIP Universitas Riau	Rp1,2 miliar	Kepala Dinas Pendidikan Riau M Wardan	Arnelia, Wasdi Permana dan Syahlan	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 15 bulan.	6 Agustus 2008
124.	Dugaan suap pengusulan anggaran bencana alam tahun 2004 ke pemerintah pusat	Rp 150 juta	Mantan Pjs Bupati Pasaman Barat M. Zambri dan mantan Kepala Bappeda Pasaman Barat Mirwan Pulungan	Ahmad Khusaeri	Pengadilan Negeri Padang	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 2,5 tahun	3 Desember 2008
125.	Korupsi dana Dispenda (pengembalian pembayaran pajak penghasilan -PPH 21)	Rp7,6 miliar	Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sukabumi, Lukas Mulyana		Pengadilan Negeri Cibadak	Bebas <u>Tuntutan JPU</u>	November 2008
126.	Korupsi dana Dispenda (pengembalian pembayaran pajak penghasilan -PPH 21)	Rp7,6 miliar	Dirut CV Archi Indo Consultan (AIC), Azib Zebriani		Pengadilan Negeri Cibadak	Bebas <u>Tuntutan JPU</u>	November 2008
127.	Penyimpangan di Dinas Perikanan Kab. Sukabumi		mantan Kepala Dinas Perikanan Kab. Sukabumi, Kurniawan Kanta Praja tahun 2003		Pengadilan Negeri Cibadak	Bebas	Oktober 2008
128.	pengadaan kertas suara pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2005.		mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Adjo Sardjono dan Sekretaris KPUD Kabupaten Sukabumi Dadang Eka		Pengadilan Negeri Cibadak	Bebas	Oktober 2008
129.	dana APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2004	Rp 4,5 miliar	mantan Bupati Sukabumi, Maman Sulaeman		Mahkamah Agung	Bebas	Oktober 2008
130.	Dana mobilisasi APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2002	Rp4,5 miliar.	mantan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi periode 1999-2004, Yusuf Fuadz		Mahkamah Agung	Bebas	Oktober 2008
131.	Dugaan korupsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2003	Rp 350 juta	Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Konawe, Hj Siti Amina	Bayu Isdiytmoko, Mochamad Arief Adikusumo dan Zulfikar Siregar	Pengadilan Negeri Unaha	Bebas	8 September 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
132.	Dugaan korupsi kas daerah Pemerintah Kabupaten Jember	Rp 1,1 miliar	Bekas Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Herwan Agus Darmanto	Eli Suprpto	Pengadilan Negeri Jember	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun penjara	20 November 2008
133.	Pembobolan dana Bank BRI Poso	Rp 3,2 miliar	Luis Lagarensen, Petugas Dana Jasa dan Kerjasama Antara Rekening Bulog dan Kepala Bank BRI Cabang Poso	Muhammad Lutfi, Muhammad Nur Ibrahim dan Purwanto	Pengadilan Negeri Poso	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 2 tahun 6 bulan penjara	23 Desember 2008
134.	Pemberian kredit macet dari BPD Jateng kepada PT Tensindo Sejati tahun 1995	Rp. 7,9 Trilyun	Kamsuri SH MM (mantan Direktur Pemasaran BPD Jateng) dan Widjiyanto SE MM (mantan Direktur BPD Jateng Cabang Semarang)	Amiryat SH,	Pengadilan Negeri Semarang	1,5 tahun penjara	26 Juni 2008
135.	Pengadaan laptop di Setda Singkawang,	Rp75,9 juta	Redi (panitia pengadaan barang) dan Asikin Morris (kontraktor)	Frans Sihaloho SH MH	Pengadilan Negeri Singkawang	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 1 tahun penjara	18 September 2008
136.	Pengadaan buku ajar SD/MI tahun 2003 di Wonogiri	Rp 3,6 miliar	Drs Ruswardijatmo	Mayawati Rachayuni, Thomas Tarigan dan Teguh Santoso	Pengadilan Negeri Wonogiri	2 tahun	13 November 2008
137.	Pengadaan buku ajar SD/MI tahun 2003 di Wonogiri	Rp 3,6 miliar	Drs Susilo	Mayawati Rachayuni, Thomas Tarigan dan Teguh Santoso	Pengadilan Negeri Wonogiri	3 tahun 6 bulan	13 November 2008
138.	Pengadaan buku ajar SD/MI tahun 2003 di Wonogiri	Rp 3,6 miliar	Drs Purwanto MPd	Mayawati Rachayuni, Thomas Tarigan dan Teguh Santoso	Pengadilan Negeri Wonogiri	1 tahun 6 bulan	13 November 2008
139.	Pembangunan jalan lingkungan Pasar Indur Rawu (PIR)	Rp 5 miliar.	Ahmad Rivai (mantan Pjs Bupati Serang)	Maenong	Pengadilan Negeri Serang	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun penjara	13 November 2008
140.	Pembangunan jalan lingkungan Pasar Indur Rawu (PIR)	Rp 5 miliar.	Aman Sukarso (mantan Sekda Pemkab Serang)	Maenong	Pengadilan Negeri Serang	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun penjara	13 November 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
141.	Pengadaan 400 unit mesin long tail (mesin tempel perahu)	Rp 114, 4 juta	Ir. Arnedi, Sukarma, SE, Ir. Rustam dan Syafriardi, S. Sos	Ahmad Khusairi SH	Pengadilan Negeri Padang	Bebas	22 September 2008
142.	Pengadaan dana pensiun dini pegawai PDAM Tirta Uli	-	Drs Barmen Saragih (61) mantan Direktur Utama (Dirut) dan Dapot Sianipar SE (56) mantan Direktur Umum (Dirum) PDAM Tirta Uli Kota P Siantar	Yansen Pasaribu, Dahlia Panjaitan, Jarihat Simarmata	Pengadilan Negeri P Siantar	Bebas	22 November 2008
143.	Penyalahgunaan dana di KPUD Bantul	Rp371 juta	Ketua KPUD Bantul Arif Iskandar, Ketua Divisi Logistik KPUD Bantul Suwandi Danu Subroto, Sekretaris KPUD Bantul Marsono		Mahkamah Agung	1 tahun penjara	5 September 2008
144.	Korupsi APBD Cilacap 2003-2004		Ketua DPRD Cilacap, Fran Lukman dan mantan Sekda Cilacap Adi Saroso		Mahkamah Agung	Bebas	September 2008
145.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang	Rp 10,4 miliar	40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Sumatera Barat	Iskandar Kamil, Moegiharjo, Bahauddin Qaudri	Mahkamah Agung	Bebas	Juli 2008
146.	Dugaan korupsi DAK (dana alokasi khusus) enam SD/MI,	Rp 11 miliar	Maskur (kepala SDN Blumbungan II), Abd. Hamid (kepala SDN Blumbungan V), M. Hasan (kepala SDN Montok III), Sunarto (kepala SDN Rangperang Laok I), M. Yudi (kepala MI Tarbiyatul Banin III), dan Zainul Badri (kepala MI Nurul Rohman).		Pengadilan Negeri Pamekasan	Bebas	November 2008
147.	Dana proyek pengadaan alat olah raga pada tahun 2006	Rp134 juta	Edison Taher, Kepala Dindik Pangkalpinang	Lilin Herlina, Isnurul Syamsul Arif, Tiares Sirait	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Bebas	3 November 2008
148.	Pengadaan tanah di pemkab Sidoarjo	Rp 2,1 miliar	Ir Soekarno, mantan Direktur Utama PT Sidoarjo Membangun	Hj Bettina Yahya, I Nyoman Dedy	Pengadilan Negeri Sidoarjo.	Bebas	1 April 2008
149.	Ruislag tanah ganjaran kelurahan Keputih	Rp 541, 5 juta	Ketua LKMD Keputih, H. Hasyim Rowie	Soedarmadi SH, Suparto SH dan Harjoto SH	Pengadilan Tinggi Jatim	Bebas	8 Maret 2008
150.	Pembobolan Bank BNI lewat pencairan surat kredit fiktif di BNI Cabang Utama Kebayoran Baru	Rp49,2 miliar	Direktur Utama PT Brocolin Internasional Achmad Sidik Mauladi Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata	Artidjo Alkostar, Mansyur Kertayasa dan Abbas Said.	Mahkamah Agung	20 tahun penjara	20 Februari 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
151.	Proyek pembangunan Jembatan Rantih	Rp93 juta	mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Syafaruddin dan Efdi Suwena, Pimpinan Kegiatan Proyek Pembangunan Jembatan Rantih, Kecamatan Talawi dan Direktur CV Mutiara Hitam, Fauzan Ramon selaku kontraktor.		Pengadilan Negeri Sawahlunto	Bebas	September 2008
152.	Pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan Mandaling Natal, Sumatera Utara		Adelin Lis, Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI)	Bagir Manan	Mahkamah Agung	10 tahun penjara	8 Agustus 2008
153.	Pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di RSU Ryacudu Kotabumi tahun 2004	Rp212 juta	Pejabat dinas kesehatan Lampung		Pengadilan Negeri Kotabumi	Bebas	18 November 2008
154.	Penyimpangan dana bencana alam (DBA) tahun anggaran 2005.	Rp 714 juta.	HE Ruhayat Prawira (Direktur PT Debi Citra Pratama), Ricky Agustian (Direktur PT Tugu Mulia Utama), Rajab Prilyadi (Dir CV Purbasari), Endang Rushendar (Dir CV Satya Abadi), Agus Ridwan (Dir CV Artha Cika Persada), Hendarman (Dir CV Satria), dan Haris (Dir CV Halofik).	I Nyoman Adi Juliasa	Pengadilan Negeri Garut	4 tahun penjara	23 Desember 2008
155.	Tiket PT Garuda Indonesia	Rp 50 juta	Elaine Helen HR, Made Sudiasa, Hanny Sumajaw, dan Ketut Mistarini	Posma P. Nainggolan	Pengadilan Negeri Denpasar	1 tahun penjara	9 Desember 2008
156.	Dana bantuan lunak subsidi BBM dari pemerintah pusat tahun anggaran 2001-2002.	Rp100 juta	Abdul Wahab Daulay, Ketua KUD Mina Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu	Irwan Munir, Nurmala Sinurat dan Imelda Sitorus	Pengadilan Negeri Rantauprapa	1 tahun penjara	24 November 2008
157.	Proyek gedung loka monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Pangkalpinang tahun 2006	-	Ermansyah		Pengadilan Negeri Pangkalpinang	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	22 Desember 2008
158.	Sewa ruko Jalan MS Rahman dan Jalan Jenderal Sudirman Pangkalpinang	-	Andi Rozano	Rosidin, T Sirait dan Ernila	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	22 Desember 2008
159.	Penyimpangan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Aceh Tengah	-	Drs. Zulkifli Rahmat, Mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Aceh Tengah	Rahmansyah, M.Jajuri dan Prana Subhan	Pengadilan Negeri Takengon	1 tahun penjara	18 Desember 2008
160.	Penyalahgunaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang kesehatan tahun 2004	Rp 673 juta	dr Dwi Priyo Hartono, wakil direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta	Y Sugiwardarto	Pengadilan Negeri Surakarta	1 tahun penjara	20 November 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
161.	Pengelolaan kegiatan pengembangan tanaman kakao tahun anggaran 2005 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumbar		Ir Suhil Noer, mantan Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Ir Fahron Rosyidi MSi, Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Tahun Anggaran 2005 yang juga merupakan Kasi Sarana dan Prasarana Produksi Disbun Sumbar, dan Yasril Sukur, mantan Kasubdin Bina Sarana dan Prasarana Disbun Sumbar	Amat Khusairi, Zulkifli, dan Abdul Aziz	Pengadilan Negeri Padang	1 tahun penjara	13 November 2008
162.	Dana Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XII di Palembang	-	Sahlan M Yasin, Kepala Kantor Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala		Pengadilan Negeri Donggala	1 tahun penjara	16 September 2008
163.	Dana purna bakti DPRD dari APBD 2003	Rp 2,5 miliar	M Warsit, Ketua DPRD Blora		Mahkamah Agung	Bebas	28 April 2008
164.	APBD 2004 untuk pos tunjangan kesejahteraan anggota dewan	Rp 2,6 miliar	Mantan Ketua dan Wakil DPRD (Wiwik Budi Santoso dan Mundir Syarif)	DJ Tambunan	Pengadilan Negeri Pati	Lepas/bebas	24 September 2008
165.	Cash Bon pada pos Setda Tala tahun 2004-2005	Rp 480 juta	Ikhsanudin, mantan Wabup Tala	Satrio Mukti Aji	Pengadilan Negeri Pelaihari	Lepas/bebas	4 Desember 2008
166.	Dana GN-RHL di Kota Payokumbuh		Azwar Chan, pejabat Dinas Kehutanan Payakumbuh	Ridho Yudhanto, Bayu Ruhul Azam, Natalina Setyowati	Pengadilan Negeri Payokumbuh	2 tahun 3 bulan	5 September 2008
167.	Penyalahgunaan dana bagi hasil pajak (PBB dan BPHTB)	Rp21,3 Miliar	Drs Chairuddin, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu	Susanto	Pengadilan Negeri Bengkulu	1 tahun penjara	28 Juli 2008
168.	Anggaran Rumah Tangga Dewan (ARTD) DPRD Nganjuk periode 1999-2004	23 Juta	Basori, Anggota DPRD Nganjuk periode 1999-2004	Burhanuddin, Gatot Ardian, Agus Cahyo	Pengadilan Negeri Nganjuk	1 tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan	5 Juni 2008
169.	dana operasional pimpinan DPRD Jember tahun anggaran 2004	Rp 706 juta	Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jember, Madini Farouq dan Machmud Sardjijono		Pengadilan Negeri Jember	1 tahun penjara	4 September 2008
170.	Proyek Keaksaraan Fungsional Diknas Pendidikan Nasional Kabupaten Tobasa	Rp.90 juta	Nasib Pasaribu, Kepala Seksi (kasi) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Toba Samosir	Saur Sitindaon, Andri Partogi Siahaan, Chitro Sitorus	Pengadilan Negeri Tarutung	1 tahun penjara	23 April 2008
171.	dana pemilihan umum 2004	Rp 360 juta	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, Ahmad Syakib, dan 3 anggota KPU, Supiyanto, Hari Prasetyo, dan Muhaimin Sutawijaya	Sumartono	Pengadilan Negeri Banyuwangi	1,5 tahun penjara	8 Juli 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
172.	pembangunan Pasar Kuta 2 pada 2006-2007	Rp 416,9 juta	Nyoman Jendra Astawa, Ketua Tim pembangunan Pasar Kuta 2 pada 2006-2007	Nyoman Utama	Pengadilan Negeri Denpasar	1tahun penjara	1 Agustus 2008
173.	Proyek pembangunan saluran drainase primer sepanjang 1150 meter di jalan Bypass Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu.	Rp 78 juta	Ir.Tarmun, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumatra Utara (Distarukimsu) di Rantauprapat	Mustofa	Pengadilan Negeri Rantauprapat	1tahun penjara	23 Januari 2008
174.	penyelewengan dana APBN 2004-2005 di Perum Bulog Divisi Regional Lampung	Rp 450 juta	Abdul Wahid selaku Kasi Perdagangan Bidang Komersial Bulog Lampung		Pengadilan Negeri Tanjungkarang	17 bulan penjara	5 Desember 2008
175.	program nasional (prona) sertifikasi tanah gratis tahun 2006	-	Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare, Budi Hartono		Pengadilan Negeri Parepare	1tahun penjara	22 September 2008
176.	ganti rugi lahan Jembatan Suramadu	Rp 115 juta	Eko Subiakto. Mantan Lurah Kalikedinding	Abdul Bari A. Rahim	Pengadilan Negeri Surabaya	1tahun 3 bulan penjara	17 November 2008
177.	Menyalahgunakan bantuan operasional Panti Werdha Mojopahit	Rp 135 juta	Eko Tjahyono, Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Mojokerto	Sulistiyowati Mulyadi ,Santoso	Pengadilan Negeri Mojokerto	1 tahun 3 bulan penjara	25 November 2008
178.	Dana kegiatan sosialisasi pilkada Bojonegoro di pos Bakesbanglinmas	Rp 186,5 juta	Sudaryanto, pejabat Bakesbanglinmas	Pudji Widodo, Lucius Sunarno, Ahmad Yani	Pengadilan Negeri Bojonegoro	13 bulan penjara	2 Desember 2008
179.	Dana kegiatan sosialisasi pilkada Bojonegoro di pos Bakesbanglinmas	Rp 3,3 juta	Lukman Hakim, pejabat Bakesbanglinmas	T. Marbun, Burhanuddin, Setyo Yoga	Pengadilan Negeri Bojonegoro	13 bulan penjara	2 Desember 2008
180.	Dana dekonsentrasi sekolah dasar	Rp 64 juta	Erna Dwi Purnomowati, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Kasdiono	Pengadilan Negeri Purwokerto	16 bulan penjara	18 Desember 2008
181.	Penjualan alat pertanian bantuan pemerintah Jepang melalui Dinas Pertanian Sulut	-	Manager pengadaan bantuan Alat Pertanian (Alsintan) Yusuf Terok	Jonny Buta-Butar, Robert Posumah, I Made Sukanada	Pengadilan Negeri Manado	1 tahun penjara	11 Desember 2008
182.	Alokasi dana desa (ADD)	Rp21 juta	Mantan Camat Rajabasa, Lampung Selatan, Barlian Yusuf	Siyoto, Chanda Gautama, Niken Rochayati	Pengadilan Negeri Kalianda	1 tahun penjara	3 Desember 2008
183.	Dana insentif guru	Rp 48 juta	Ibrahim, mantan Kepala SMA Negeri 3 Lhoksukon atau SMA Unggul Aceh Utara		Pengadilan Negeri Lhoksukon NAD	1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun	30 Oktober 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
184.	Pembangunan GSG Singgarang	Rp 41 juta	Ali Santo, kontraktor	Djaroko Imam Winodadi, Sri Endang Amperawati, Rakmoho	Pengadilan Negeri Tanjungpinang	1, 5 Tahun Penjara	11 November 2008
185.	Pembangunan pasar kandang di Jalan M Idris Medan	Rp 205 juta	Pahala Panjaitan ST MT selaku Pengawas Teknik Untuk Pembangunan Pasar Kandang pada PD Pasar Medan	Charles Simamora	Pengadilan Negeri Medan	1 tahun penjara	20 November 2008
186.	Penggelembungan dana proyek Citra Logam Mulya	Rp7,5 Miliar	Herman Kusnadi, pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan		Pengadilan Negeri Pamekasan	Bebas	18 September 2008
187.	Dana BRR (badan rehabilitasi dan rekonstruksi) perwakilan Nias	Rp 422 juta	Risman Simanjuntak, Kasatker (kepala satuan kerja) BRR perwakilan Nias	JP Ziralu	Pengadilan Tinggi Medan	16 bulan penjara	17 September 2008
188.	Penyelewengan dana PT Taspen Bogor	Rp397 juta	Sardju, Kabid Pelayanan PT Taspen Bogor	Gusrizal, Gede Ariawan, Tirolan Nainggolan	Pengadilan Negeri Bogor	1 tahun penjara	14 Februari 2008
189.	Penyelewengan dana PT Taspen Bogor	Rp397 juta	Yulianto Ujang Wibisono, Staf Pelayanan PT Taspen Bogor	Gede Ariawan	Pengadilan Negeri Bogor	2 tahun penjara	14 Februari 2008
190.	Proyek Jl tembus Sentosa-Juanda Depok	Rp 91 juta	Bahtera Sagara, mantan Kasie Pembangunan Dinas PU Kota Depok		Pengadilan Negeri Depok	1 tahun penjara	30 Januari 2008
191.	penyelewengan dana proyek pembangunan dan pengembangan usaha tani	Rp 200 juta	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Mahmud Tan		Pengadilan Negeri Ambon	1 tahun penjara	7 April 2008
192.	Biaya Nikah dan Pungli CPNSD	Rp 630 juta	H. Joefri, Kepala Kantor Departemen Agama Magetan		Pengadilan Negeri	4 tahun penjara	9 September 2008
193.	Dana operasional pimpinan DPRD Jember tahun anggaran 2004	Rp 706 juta	H.M Madini Farouq (ketua dewan) dan H. Machmud Sardjuno (wakil ketua) DPRD Jember	Basoeki, Srimurwahyudi dan Masud Halim	Pengadilan Tinggi Surabaya	Bebas	6 November 2008
194.	Anggaran keamanan pasar dan anggaran koordinasi lintas lembaga Pemkot Medan 2003 - 2007	Rp 600 juta	Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Medan, Nawawi	Jarasmen Purba	Pengadilan Negeri Medan	1 tahun penjara	25 Agustus 2008

Dokumentasi : Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch 2008
Sumber : Pemberitaan Media dan laporan mitra selama 2008

D. DAFTAR PERKARA KORUPSI YANG TELAH DIPUTUS PENGADILAN TIPIKOR (TINGKAT PERTAMA) SELAMA TAHUN 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Tingkat Pengadilan	Vonis	Waktu
1.	Pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Riau	Rp1,518 miliar	Saleh Djasit, anggota Komisi IV DPR-RI (mantan Gubernur Riau)	Moefri	Pengadilan Tipikor	4 tahun penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan	28 Agustus 2008
2.	Pungutan liar (Pungli) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia	Rp 815 juta	Rusdihardjo, mantan Dubes RI untuk Malaysia		Pengadilan Tipikor	2 tahun penjara, uang pengganti Rp 815 juta	11 Juni 2006
3.	Suap kepada Komisioner Komisi Yudisial untuk Pengadaan tanah untuk gedung Komisi Yudisial	-	Freddy Santoso, Dirut PT Persada Sembada		Pengadilan Tipikor	4 tahun penjara, denda sebesar Rp250 juta	20 Februari 2008
4.	Pengadaan alat bantuan Tsunami pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat tahun 2006	Rp 8,372 miliar	Pemegang kuasa anggaran Dinas Perikanan Jabar, Asep Hartiyoman, dan pimpinan proyek pengadaan, Ade Kusmana,	Moefri	Pengadilan Tipikor	2 tahun penjara serta denda Rp50 juta dan uang pengganti Rp570 juta	10 Desember 2008
5.	Pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Makassar	Rp 4,31 miliar	Baso Amiruddin Maula, Walikota Makassar	Kresna Menon	Pengadilan Tipikor	4 tahun penjara serta denda Rp50 juta dan uang pengganti Rp570 juta	6 Maret 2008
6.	Renovasi KBRI Singapura	400 ribu Dollar Singapura	Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Muhammad Slamet Hidayat dan mantan Bendahara KBRI Singapura, Erizal	Masrurdin Chaniago	Pengadilan Tipikor	3 tahun penjara dan denda masing-masing Rp150 juta, subsider 6 bulan penjara	17 Desember 2008
7.	proyek pemeriksaan dan audit investigasi penggunaan tenaga kerja asing di 46 kabupaten dan kota pada 2004	Rp 5,8 miliar	MSM Simanihuruk, Mantan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Martini Marjah	Pengadilan Tipikor	4 tahun penjara <u>Tuntutan JPU</u> 6 tahun penjara	29 April 2008
8.	proyek pemeriksaan dan audit investigasi penggunaan tenaga kerja asing di 46 kabupaten dan kota pada 2004	Rp 5,8 miliar	Suseno Tjipto Mantoro, Kepala Sub Direktorat Tata Laksana dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan	Martini Marjah	Pengadilan Tipikor	1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan, dan uang pengganti Rp 3 juta. <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun penjara.	29 April 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Tingkat Pengadilan	Vonis	Waktu
9.	Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan	-	Taswin Zein, Kasubdit Pengembangan Sistem dan Inovasi Direktorat Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Depnakertrans		Pengadilan Tipikor	4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta	11 Desember 2008
10.	Pungutan liar (Pungli) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2000 sampai 2003	Rp15 miliar	Mantan Duta Besar (Dubes) Hadi A Wayarabi Alhadar dan mantan Kepala Bidang Imigrasi Suparba W Amiarsa	Mansyurdin Chaniago	Pengadilan Tipikor	2,5 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,750 miliar <u>Tuntutan JPU</u> 2,5 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp7,571 miliar	2 Januari 2008
11.	Penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Urip Tri Gunawan senilai US\$ 660.000	-	Artalyta Suryani, pengusaha	Mansyurdin Chaniago	Pengadilan Tipikor	5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta	29 Juli 2008
12.	Penyuapan senilai US\$ 660.000 yang dilakukan oleh Artalyta	-	Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	Teguh Haryant	Pengadilan Tipikor	20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta <u>Tuntutan JPU</u> 15 tahun penjara dan denda Rp 250 juta	4 September 2008
13.	Penyelewengan dana bantuan tsunami Jawa Tengah tahun 2006	Rp 7,299 miliar	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah Hari Purnomo	Teguh Haryanto	Pengadilan Tipikor	5 tahun penjara, denda Rp 150 juta, subsider pidana kurungan 3 bulan, uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar <u>Tuntutan JPU</u> 5 tahun penjara	22 Mei 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Tingkat Pengadilan	Vonis	Waktu
14.	Penyelewengan dana bantuan tsunami Jawa Tengah tahun 2006	Rp 7,299 miliar	Margaretha Elizabeth Tutuarima, Pimpro Tsunami	Teguh Haryanto	Pengadilan Tipikor	6 tahun penjara, denda Rp 150 juta, subsider pidana kurungan 3 bulan, membayar uang pengganti Rp 1,088 miliar <u>Tuntutan JPU</u> 6 tahun penjara	22 Mei 2008
15.	Proyek feasibility studies (FS) pembangunan Bandara Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur	Rp 4,047 miliar	Bupati Minahasa Utara Vonnice Anneke Panambunan	Moefri	Pengadilan Tipikor	1,5 tahun penjara <u>Tuntutan JPU</u> 20 tahun penjara	16 Mei 2008
16.	Suap proyek pengadaan kapal patroli di Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan senilai Rp 1,68 miliar	-	Dedy Suwarsono, Direktur PT Bina Mina Karya Sentosa	Teguh Haryanto	Pengadilan Tipikor	4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta	1 Desember 2008
17.	APBD Kabupaten Garut	Rp9,182 miliar	Bupati Garut Nonaktif Agus Supriadi		Pengadilan Tipikor	7 tahun 6 bulan penjara, membayar ganti kerugian negara sebesar Rp 8,183 miliar dan denda sebesar Rp 300 juta.	23 April 2008
18.	Aliran dana Bank Indonesia	Rp 100 miliar	mantan Deputi Direktur Biro Hukum Bank Indonesia (BI) Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak	Moefri	Pengadilan Tipikor	empat tahun penjara serta denda Rp200 juta, uang pengganti sebesar Rp3 miliar	12 November 2008
19.	Penyimpangan proyek pembangunan pusklat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	Rp 9,415 miliar	Kepala Biro Umum Bapeten Hieronimus Abdul Salam	Sutiyono	Pengadilan Tipikor	4,5 tahun penjara <u>Tuntutan JPU</u> 7 tahun penjara	22 Februari 2008
20.	Penyimpangan proyek pembangunan pusklat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	Rp 9,415 miliar	Pimpro pembangunan pusklat, Sugiyo Prasajo	Sutiyono	Pengadilan Tipikor	3 tahun penjara <u>Tuntutan JPU</u> 5 tahun penjara	22 Februari 2008

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Tingkat Pengadilan	Vonis	Waktu
21.	Penyimpangan proyek pembangunan pusdiklat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	Rp 9,415 miliar	Noor Adenan Razak, Anggota DPR		Pengadilan Tipikor	3 tahun penjara denda Rp 150 juta	2008
22.	Pengadaan Damkar Kalimantan Timur		Ismet Rusdandy, Pimpro Pengadaan Damkar Kalimantan Timur		Pengadilan Tipikor	2 tahun penjara, denda Rp 100 juta, uang pengganti Rp 14,4 juta	2 Juli 2008
23.	Penggunaan dana YPPI untuk bantuan hukum para mantan pejabat BI, diseminasi BLBI dan amandemen UU BI	Rp100 miliar	Burhanuddin Abdullah, Mantan Gubernur Bank Indonesia	Gusrizal	Pengadilan Tipikor	5 tahun penjara, denda sebesar Rp250 juta	29 Oktober 2008
24.	Penerbitan izin hak pemanfaatan hutan tanaman di kabupaten Pelalawan, Riau	Rp 1, 208 triliun	Bupati Pelalawan Azmun Jaafar	Kresna Menon	Pengadilan Tipikor	11 tahun penjara dan denda 500 juta subside 6 bulan, uang pengganti sebesar Rp 12,367 miliar <u>Tuntutan JPU</u> 12 tahun penjara dan uang pengganti Rp 19 miliar	16 September 2008
25.	Pembangunan Mess Pemda Jambi di Jl Cidurian, Cikini Jakarta	Rp 7,4 miliar	Sekretaris Wilayah Propinsi Jambi, Chalik Saleh	Moerdiono	Pengadilan Tipikor	3 tahun penjara, denda Rp 150 juta serta membayar uang pengganti Rp 950 juta <u>Tuntutan JPU</u> 4 tahun dan denda Rp 250 juta, uang pengganti Rp 2 Miliar	15 Oktober 2008
26.	Penyuapan anggota DPR Al Amin Nasution untuk memperlancar proses alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Riau	-	Sekda Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan	Mansyurdin Chaniago, Edward Pattinasarani, Dudu Duswara, Andi Bachtiar, dan Ugo	Pengadilan Tipikor	30 bulan penjara, denda Rp 100 juta	2 September 2008
27.	Pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen AHU (Administrasi Hukum) Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004	Rp 3,7 miliar	Eman Rachman, direktur PT Sentra Filindo		Pengadilan Tipikor	4 tahun, denda Rp 250 juta, uang pengganti sebesar Rp 3,7 miliar	2008

Dokumentasi : Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch 2008

Sumber : Pemberitaan Media selama 2008